

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sampai saat ini, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah dan tantangan pembangunan di banyak negara di seluruh dunia. Akibatnya, Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kesepakatan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB untuk mencapai tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dengan prinsip universal, integrasi, dan inklusif. MDGs berakhir pada akhir tahun 2015. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya adalah tujuan pertama dari SDGs. Ini disebut sebagai "mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun". Angka kemiskinan ekstrim telah menurun lebih dari 50% sejak tahun 1990, menghambat tujuan ini. Walaupun ini merupakan pencapaian yang luar biasa, satu dari lima orang di negara berkembang masih berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari, dan banyak dari mereka masih mungkin terjebak kembali ke dalam lingkaran kemiskinan.

Kemiskinan bukan hanya tentang kurangnya sumber daya untuk bertahan hidup dan pendapatan. Selain itu, kemiskinan mencakup kekurangan gizi dan kelaparan, kekurangan akses terhadap pendidikan dan pelayanan dasar lainnya, pengucilan dan diskriminasi sosial, dan kurangnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan (UN DESA, 2018). Ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan ditangani dalam kerangka multidimensi: melihat kemiskinan dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan berbagai sumber kemiskinan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 telah menginternalisasikan masalah kemiskinan secara global. RPJPN melihat kemiskinan dari berbagai sudut pandang, termasuk bukan hanya tingkat pendapatan, tetapi juga pemenuhan hak dasar warga dan perbedaan perlakuan terhadap individu atau kelompok masyarakat dalam menjalani hidup mereka.

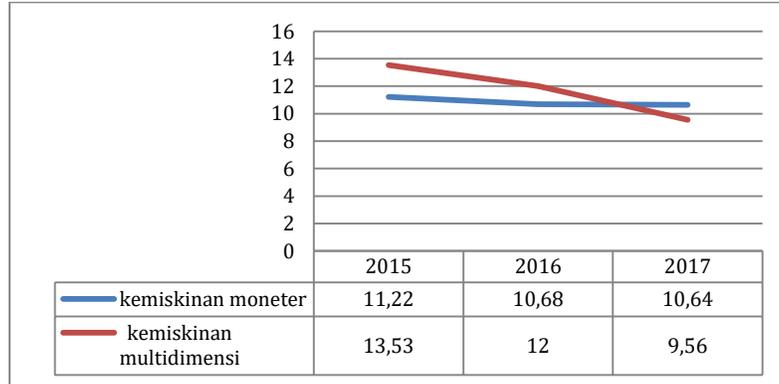
Menurut Bank Dunia (2007) terdapat tiga karakteristik yang dominan dari fenomena kemiskinan di Indonesia di antaranya:

- a. Banyak penduduk Indonesia yang rentan terhadap kemiskinan. Rumah tangga di Indonesia berada di sekitar garis kemiskinan nasional sehingga perbedaan antara rumah tangga miskin dengan rumah tangga hampir-miskin sangat kecil.
- b. Terdapat masalah yang lebih serius daripada kemiskinan dalam segi pendapatan yaitu kemiskinan dari segi non-pendapatan. Jika berdasarkan indikator MDG, Indonesia belum mencapai kemajuan dan masih tertinggal dibandingkan dengan Negara-negara yang berada di wilayah yang sama. Indikator kunci yang perlu diperhatikan adalah:

1. Malnutrisi yang tinggi bahkan mengalami peningkatan
  2. Kematian ibu di Indonesia lebih besar dibandingkan Negara-negara lain di Asia, sama halnya dengan kesehatan ibu hamil yang juga lebih buruk.
  3. Lemahnya *outcomes* pendidikan
  4. Akses terhadap air bersih yang rendah. Pada daerah pedesaan, besar kepemilikan akses air bersih hanya 48 persen sedangkan di daerah perkotaan sebesar 78 persen.
  5. Kurangnya akses sanitasi yang baik.
- c. Ketimpangan kemiskinan yang besar antarwilayah.

Berdasarkan karakteristik kemiskinan di Indonesia, indikatornya didominasi oleh dimensi yang berhubungan dengan kesehatan dan standar hidup yang rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran kemiskinan dari sisi multidimensi. Angka kemiskinan multidimensi di Indonesia sudah dilakukan oleh lembaga PRAKARSA hingga tahun 2018. Gambar 1 menunjukkan kondisi angka kemiskinan multidimensional dan kemiskinan moneter di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2018. Perbandingan ini dilakukan berdasarkan Maret masing-masing tahun. Tahun 2015-2016, angka kemiskinan multidimensional lebih tinggi daripada dengan angka kemiskinan

moneter. Namun, di tahun 2017 angka kemiskinan multidimensional turun signifikan meninggalkan angka kemiskinan moneter.



**Gambar 1 Angka kemiskinan multidimensi dan moneter Indonesia Tahun 2015-2018**

*Sumber: Aidha et al. (2020)*

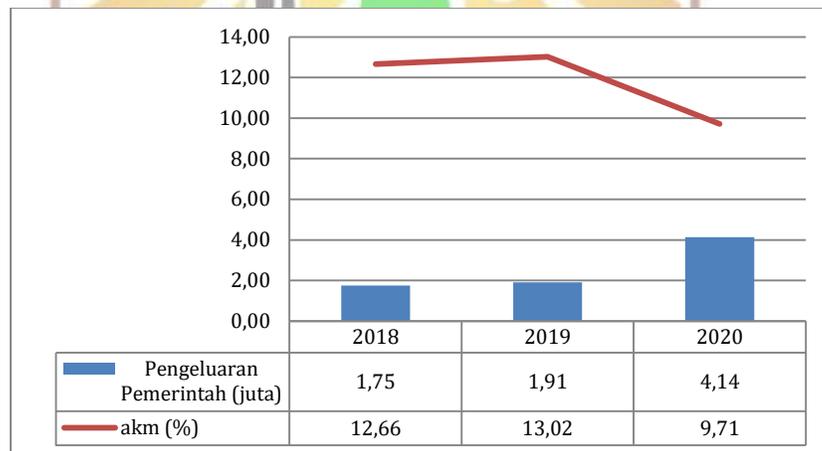
Angka kemiskinan multidimensional di Indonesia terjadi tren menurun yang beriringan bersama tren kemiskinan moneter. Namun, menurunnya angka kemiskinan multidimensional lebih besar daripada penurunan kemiskinan berdasarkan pendapatan. Penurunan yang lebih progresif ini menunjukkan bahwa kondisi penduduk miskin telah diperbaiki secara lebih efektif jika dari kapabilitas hidup daripada segi pendapatan; hal demikian menunjukkan orang yang miskin sudah mengalami perbaikan terutama dalam hal kapabilitas hidup. Akibatnya, kesejahteraan meningkat pada segi kebutuhan dasar orang miskin daripada peningkatan kesejahteraan dari segi pendapatan.

Pengeluaran pemerintah adalah alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memerangi kemiskinan. Pengeluaran pemerintah mengacu pada kebijakan pemerintah yang menghasilkan biaya. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi suatu indikasi komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sistem otonomi daerah yang sudah diterapkan oleh Indonesia membuat setiap daerah bebas mengatur daerahnya sendiri termasuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja

daerah (APBD). Hal ini sesuai dengan UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah agar setiap pemerintah menjadi lebih dekat dengan rakyatnya sehingga kebijakan yang diterapkan bias lebih efektif dan efisien.

Melalui peningkatan indikator-indikator pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan dan dari segi non-pendapatan. Menurut Bank Dunia (2007) ada tiga cara pemerintah dapat membelanjakan uang untuk memerangi kemiskinan: pelayanan sosial di bidang kesehatan dan pendidikan, investasi dalam infrastruktur, dan bantuan dan jaring pengaman sosial.

Gambar 2 memperlihatkan tren angka kemiskinan multidimensi Indonesia dan rata-rata pengeluaran pemerintah daerah per kapita pada bidang perumahan fasilitas umum, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bantuan sosial pada tahun 2018 hingga tahun 2020.



**Gambar 2 Angka kemiskinan multidimensi dan pengeluaran pemerintah Tahun 2018-2020**

*Sumber: DJPK Kemenkeu dan SUSENAS (diolah)*

Tampak pada gambar 2 terjadi fluktuasi pada angka kemiskinan multidimensi di periode tahun 2018-2020. Sedangkan tren pengeluaran

pemerintah mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat lebih lanjut bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pemerintah daerah terhadap angka kemiskinan multidimensi di Indonesia pada tahun 2018-2020 dalam penelitian berjudul “Pengeluaran Pemerintah dan Kemiskinan Multidimensional di Indonesia Tahun 2018-2020.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka masalah yang dirumuskan adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi perumahan dan fasilitas umum terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia?
- 2) Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk

- 1) Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi perumahan dan fasilitas umum terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia.
- 2) Mengetahui pengaruh pengeluaran pada belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan multidimensi di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1) Penelitian ini akan memperkaya pembicaraan tentang kemiskinan, dan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya tentang kemiskinan.
- 2) Memberikan informasi pada instansi terkait, terutama pemerintah, tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan dari perspektif yang lebih luas, sehingga diharapkan kebijakan penanggulangan yang dibuat akan lebih tepat sasaran.